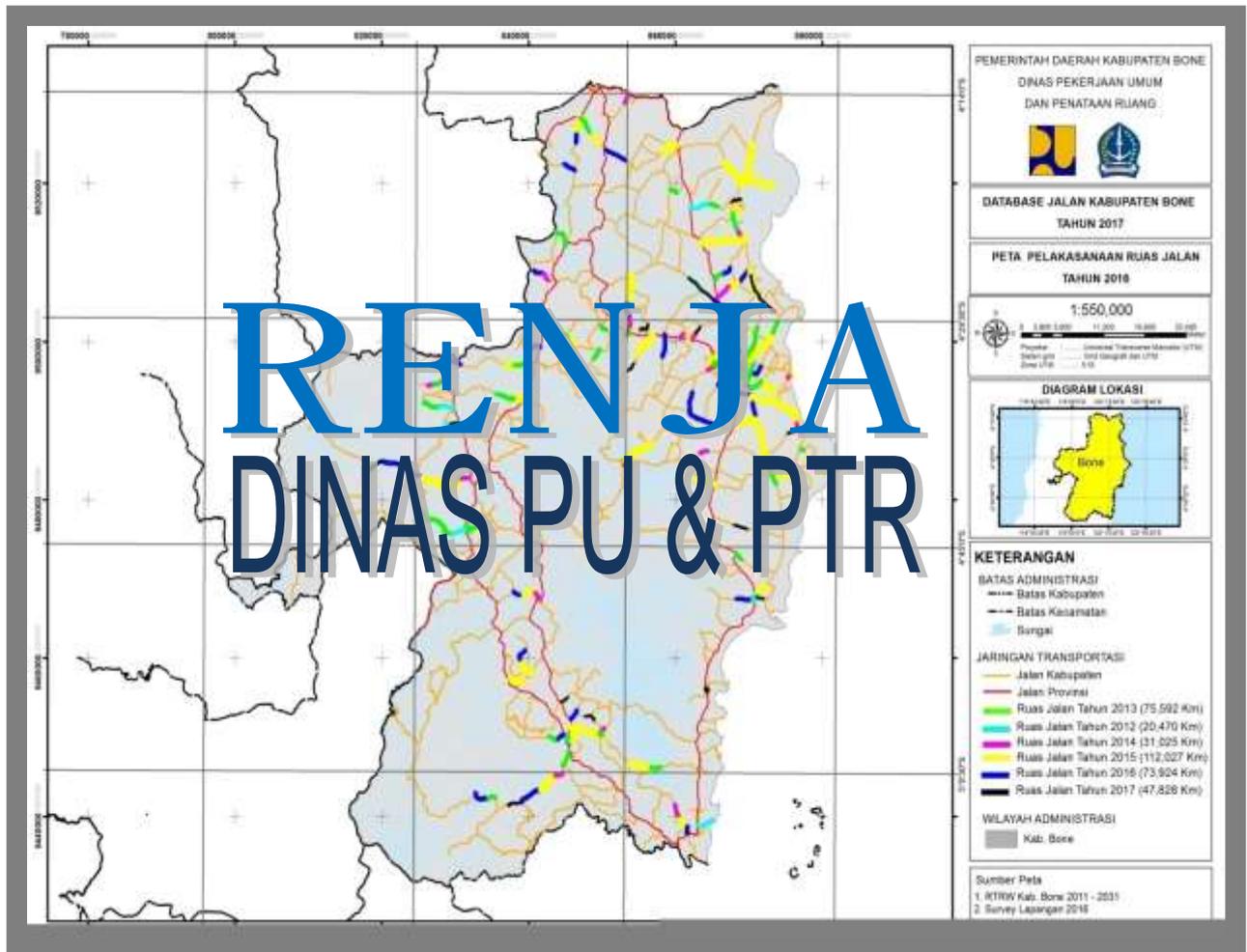




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2018



DINAS PU & PTR
KABUPATEN BONE



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 Renja Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 10

(Sepuluh) indikator kinerja utama, terdapat 8 (Delapan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, April 2018

KEPALA DINAS



Ir. H. KHALIL, MT

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19651112 199203 1 014

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum	1
D. Hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan Renstra SKPD	2
E. Sistematika Penulisan	2
BAB II TUGAS DAN FUNGSI	4
A . Kedudukan	4
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah	4
C. Struktur Organisasi	4
D. Susunan Kepegawaian	5
E. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana	16
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017	19
A. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	19
B. Aspek Keuangan	45
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	46
B. Visi dan Misi	46
C. Tujuan dan Sasaran	47
D. Program dan Kegiatan	48
BAB V INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER	
PENDANAAN	51
A. Indikator Kinerja	51

B. Kelompok Sasaran	52
C. Sumber Pendanaan	52
BAB VI PENUTUP	53

D

aftar Tabel

1. Tabel 2.1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16
2. Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Benda Bergerak	17
3. Tabel 2.3. Kondisi Alat-alat Kebinamargaan	18
4. Tabel 3.1. Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2017 Dinas PU-PTR	19
5. Tabel. 2.5.1.1. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU)	25
6. Tabel. 2.5.1.2. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU) Tahun Anggaran 2017 ..	26
7. Tabel 2.5.1.3. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU Perubahan)	27
8. Tabel. 2.5.3. Realisasi Pembangunan Jembatan T.A. 2017.....	28
9. Tabel. 2.7.1.1. Rencana Capaian Kinerja Tahun 2013-2018	29
10. Tabel 2.7.1.2. Realisasi Capaian Kinerja 2013-2017	30
11. Tabel 2.11.2. Daftar Ruas Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	33
12. Tabel 2.1.1.4 Daftar Realisasi Ruas Rehab/Pemeliharaan Jalan (DID)	34
13. Tabel 3.9.1 Kegiatan Inspeksi Jalan	35
14. Tabel 3.9.2. Kondisi Jembatan Tahun 2013-2017	36
15. Tabel 3.10 Daftar Alat dan Kendaraan Berat Dinas PU-PTR	37
16. Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Anggaran 2017	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013 – 2018, Skala Prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk satu Tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan Efisiensi kegiatan SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi pada pencapaian hasil.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 yaitu :

- 1). Untuk memberikan Informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategis dan prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2). Sebagai tolak ukur kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018.
- 3). Untuk memberikan Informasi tentang Indikator kinerja dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan berikutnya di tahun 2018.

C. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, Landasan hukum yang menjadi dasar

pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1). Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang
- 2). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 3). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang RPJMD.

D. Hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan Renstra SKPD

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen Pelaksanaan Program dan kegiatan untuk Satu Tahun Anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renja dengan Renstra SKPD
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- A. Kedudukan
- B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
- C. Struktur Organisasi
- D. Susunan Kepegawaian

- BAB III** EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013
- A. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik
 - B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan
 - C. Aspek Keuangan
- BAB IV** TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. Visi dan Misi
 - B. Tujuan dan Sasaran
 - C. Program dan Kegiatan
- BAB V** INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER DANA.
- BAB VI** PENUTUP.
- LAMPIRAN**

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. Kedudukan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone sebagai salah satu lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

C. Struktur Organisasi

Perubahan struktur organisasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Kepada Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Penataan Ruang
 - Seksi Pemanfaatan Ruang
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
 - Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
7. UPTD
8. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

D. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangserta kebijakan Bupati;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;

- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sdm) aparatur sipil negara (asn) melalui program pekerjaan umum dan penataan ruang dan pelatihan;
- Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- Melaksanakan pembinaan staf; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

2.2. Sub bagian program dipimpin oleh kepala sub bagian program yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
- Melaksanakan penyusunan laporan standar pelayanan minimal (spm);
- Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- Membuat rencana kerja tahunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya.

3. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-pu an;
- Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- Pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- Penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan justifikasi teknis;
- Pengawasan pemanfaatan jalan;
- Pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;.
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
- Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;

- Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4. Bidang Jalan Dan Jembatan

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
- penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas Kabupaten yang dibangun oleh prakarsa Daerah.
- pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
- pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
- Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 4.2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :
- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
 - Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
 - Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Menyusun studi kelayakan;
 - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 4.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:
- Menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
 - Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan penataan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-pu an.
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-pu an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas:

- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :
- Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an.
 - melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.
 - melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
 - menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an.
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
- 6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:
- Melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
 - Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-pu an
 - Melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – pu an
 - Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
 - Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
 - Melaksanakan pengelolaan laboratorium;
 - Melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
 - Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

7. UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 214 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan Status Golongan / Kepangkatan

- Golongan IV/b sebanyak 3 Org
- Golongan IV/a sebanyak 4 Org
- Golongan III/d sebanyak 6 Org
- Golongan III/c sebanyak 9 Org
- Golongan III/b sebanyak 6 Org
- Golongan III/a sebanyak 35 Org
- Golongan II/d sebanyak 6 Org
- Golongan II/c sebanyak - Org
- Golongan II/b sebanyak 81 Org
- Golongan II/a sebanyak 22 Org
- Golongan I/d sebanyak 13 Org
- Golongan I/c sebanyak 2 Org

- Golongan I/b sebanyak 25 Org
- Golongan I/a sebanyak 2 Org

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

- Pendidikan Diklat PIM II Sebanyak - Org
- Pendidikan Diklat PIM III sebanyak 9 Org
- Pendidikan Diklat PIM IV sebanyak 5 Org

3. Berdasarkan Eselonisasi (25 Org)

- Eselon II/b sebanyak 1 Org
- Eselon III/a sebanyak 1 Org
- Eselon III/b sebanyak 5 Org
- Eselon IV/a sebanyak 18 Org

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki sebanyak 183 Org
- Perempuan sebanyak 31 Org

Selain Sumber Daya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdapat juga Sumber daya pegawai yang berstatus Non PNS sebanyak 29 orang

E. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang merupakan Aset pemerintah Kabupaten Bone sesuai tabel berikut :

Tabel 2.1.
Sumberdaya Sarana dan Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	LUAS (M2)	LETAK / ALAMAT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	5	7	11	14
1	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	10.302	JALAN LAKS. YOS SUDARSO	KANTOR DAN GEDUNG AULA DINAS PU & PTR	
2	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	10.302	JALAN ANDI CELLENG	WORKSHOP BINA MARGA	

Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Benda Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1 Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1 Unit	Baik
6	Kendaraan ^{Dinas} Roda 2	2003	1 Unit	Kurang Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1 Unit	Kurang Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2000	1 Unit	Kurang Baik
15	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2008	1 Unit	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1 Unit	Kurang Baik
17	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1 Unit	Kurang Baik
18	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1 Unit	Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1 Unit	Baik
21	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1 Unit	Baik
22	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1 Unit	Kurang Baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1 Unit	Kurang Baik
24	Kendaraan Dinas Roda 2	2005	1 Unit	Baik
25	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	1999	1 Unit	Baik
26	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2000	1 Unit	Baik
27	Kendaraan Dinas Roda 2	1999	1 Unit	Baik
28	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2001	1 Unit	Baik
29	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1 Unit	Baik

30	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
31	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
32	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
33	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
34	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
35	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
36	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
37	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
38	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
39	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
40	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Rusak Sekali
41	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
42	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
43	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
44	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
45	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
46	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
47	Kendaraan Dinas Roda 2	2004	1	Unit	Kurang Baik
48	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

Kondisi Alat-alat berat kebinamargaan di Kabupaten Bone, masih jauh dari kebutuhan. Selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Perkembangan Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Baik (Unit)	3	4	3	3	2
2.	Sedang (unit)	3	2	0	0	1
3.	Rusak Ringan (Unit)	11	11	10	6	7
4.	Rusak Berat (Unit)	4	4	8	7	5
5.	Rusak Total (Unit)	5	5	6	10	11
6.	Dilelang (Unit)	-	-	-	-	-
	JUMLAH	26	26	26	26	26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PTR Kab Bone, 2016

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

A. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik

Untuk mencapai indikator kinerja urusan tersebut maka pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone telah tersusun Rencana Strategis (**RENSTRA**) 2013 – 2018 dan Review Renstra Tahun 2013 – 2018. Rencana Strategis yang disusun diharapkan mampu mewujudkan pencapaian RPJMD yang dimaksud pada misi ke-4 melalui Bidang yang ada pada struktur organisasi dan perubahannya. Tabel dibawah ini merupakan rekapitulasi program dan rencana anggaran yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

Dengan memperhatikan Rencana Strategik dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran strategis secara kuantitatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2017 Dinas PU - PTR

<i>NO</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>RENCANA ANGGARAN (Rp.)</i>	<i>REALISASI ANGGARAN</i>	<i>CAPAIAN %</i>
1	2	3	4	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,681,107,500	1,606,815,766	95.58
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,061,128,000	839,182,875	79.08
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90,000,000	80,650,000	89.61
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,620,000	13,530,000	99.34
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	84,725,845,563	82,111,508,212	96.91
6	Program Pengembangan Data/Informasi	211,767,500	207,239,086	97.86
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	71,000,000	57,000,000	80.28
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan	79,422,960,426	79,274,466,176	99.81

9	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	153,470,000	153,390,000	99.95
10	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	4,410,000	4,410,000	100.00
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	267,545,000	236,580,420	88.43
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	46,687,800	-	-
13	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	24,562,295,000	24,163,280,350	98.38
14	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	250,382,000	209,553,100	83.69
15	Program Penyelenggaraan Jalan	400,000,000	396,991,000	99.25
<i>TOTAL</i>		<i>192,962,218,789</i>	<i>189,354,596,985</i>	<i>98.13</i>

2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.681.107.500 dengan realisasi anggaran RP. 1.606.815.766 atau 95,58%.

Pada program ini terdiri 6 Kegiatan.

2.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Bone dialokasikan dana sebesar Rp. 151.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.133.684.772,- dengan sisa anggaran Rp. 17.315.228,- atau realisasi 88.53%.

Sedangkan kegiatan fisik 100%. Kegiatan ini meliputi pembayaran jasa komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Air PDAM dan Telepon serta Wifi.

2.1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.487.217.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 440.110.000,- dengan sisa anggaran Rp. 47.107.500 atau 90,33% sedangkan kegiatan 100%.

Kegiatan ini meliputi pembayaran Honorarium PPTK, Honorarium Tim PHO, Honorarium Pemeriksa Barang, Honorarium PPK dan Pembantu PPK, Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara, Pembayaran uang Lembur PNS dan Non PNS, Belanja Jasa Upah Tenaga Administrasi Kantor dan juga Tenaga Operator.

2.1.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meliputi Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 32.505.650 atau 95,60% tersisa anggaran Rp. 1.464.350 dengan realisasi fisik 100% yang direncanakan.

2.1.4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta penataan ruang. Termasuk juga terhadap kontrol sosial oleh masyarakat melalui media cetak dan media on line, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.130.000.000,- sedangkan realisasi

sebesar Rp.129.990.000,-dengan sisa anggaran Rp10.000,- atau realisasi keuangan 99.99% dan fisik 100%. Kegiatan ini meliputi pembayaran beberapa media informasi yang ada di Kabupaten Bone baik media harian/mingguan serta majalah.

2.1.5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu melakukan rapat koordianasi dalam daerah ataupun luar daerah Kabupaten Bone. Alokasi Anggaran Rp. 683.200.000 Realisasi Anggaran Rp. 679.568.644 atau 99.47% serta sisa anggaran Rp. 3.631.356.

Kegiatan ini mendanai perjalanan dinas di dalam Kabupaten Bone ataupun diluar Kabupaten Bone berdasarkan surat tugas.

2.1.6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU - PTR Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp.195.690.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.956.700,- atau realisasi 97.58%, sisa anggar Rp. 4.7333.300 . Kegiatan ini meliputi belanja Alat tulis kantor, Belanja makan dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat serta belanja makan dan minuman tamu.

2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 1.061.128.000 dengan realisasi anggaran Rp. 839.182.875 atau 79.08% dengan sisa anggaran Rp. 221.945.125. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan.

2.2.1. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pada rumah dinas yang ada. Kegiatan pembangunan rumah dinas dengan alokasi anggaran Rp. 226.460.0000 realisasi anggaran Rp. 223.777.000 atau realisasi 98,82% tersisa anggaran 2.683.000.

Kegiatan membiayai pekerjaan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, fisik pembangunan pagar rumah dinas dan pemasangan kanopi. Selain itu membiayai honorarium pejabat pengadaan, tim PPHP dan biaya administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud..

2.2.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sarana dan prasarana perkantoran dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 289.718.000 realisasi anggaran Rp. 99.718.000 atau 34,42% dengan sisa anggaran Rp. 190.000.000. Kegiatan ini meliputi pengadaan Komputer 4 Unit, pengadaan laptop 5 Unit, pengadaan printer 4 Unit.

2.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara gedung kantor agar dipertahankan kondisi bangunan agar tetap terjaga pemanfaatan gedung dengan maksimal. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 286.821.500 atau 95,61% dan sisa anggaran Rp. 13.178.500.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan terhadap Pemeliharaan dan Pemasangan anti Rayap Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Jalan Laksamana Yos Sudarso Watampone.

2.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung operasional dan mobile aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 224.300.000 dengan realisasi Rp. 208.971.0375 atau 93.17% dengan sisa anggaran Rp. 15.328.0625.

Pembiayaan kegiatan ini meliputi Biaya jasa service kendaraan, penggantian suku cadang, Bahan Bakar, Biaya surat nomor kendaraan.

2.2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini diperuntukkan untuk memelihara peralatan gedung kantor agar tetap berfungsi dengan baik. Alokasi Anggaran Rp. 20.0650.00 realisasi Rp. 19.895.000 atau 96.34% tersisa anggaran Rp. 755.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan perbaikan/Pemeliharaan AC Split, perbaikan printer dan computer.

2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran Rp. 90.000.000 realisasi Rp. 80.650.000 atau 89,61% dengan sisa anggaran Rp. 9.350.000.

Program dan Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sumber daya aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini berupa Kursus singkat dan pelatihan.

2.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.620.000 realisasi Rp. 13.530.000 atau 99,34% tersisa anggaran Rp. 90.000.

Program kegiatan ini meliputi pembiayaan Cetak, penggandaan dokumen capaian kinerja LAKIP Tahun 2016 (LKjIP), LPPD 2016, Realisasi Fisik dan Keuangan

2.5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.725.845.563 realisasi anggaran Rp. 82.111.508.212 atau 96,91% tersisa anggaran sebesar Rp. 2.614.337.351. Realisasi Fisik 100%

2.5.1. Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU)

Pembangunan Jalan 01 (DAU Pokok)

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 21.371.026.000 dengan realisasi anggaran Rp. 21.362.332.900 atau 99,96% dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 105.069.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan, pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud.

Tabel 2.5.1.1. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU)

No	Nama Ruas (Lokasi)	Volume	Satuan
1	Ruas Jalan Mappesangka - Binuang Kec. Ponre	1.100	Km
2	Ruas Jalan Poros Dsn Appale Desa Mario Kec. Libureng	1.500	Km
3	Ruas Jalan Sijelling - Turungeng Kec. Tellu Siattinge	1.000	Km
4	Ruas Jalan Tinco - Tompo Bulu Kec. Libureng	1.500	Km
5	Ruas Jalan Passippo - Bainang Kec. Palakka	1.000	Km

6	Ruas Jalan Hulo - Pacing Kec. Kahu	1.000	Km
7	Ruas Jalan SMP 9 Watampone Kec. T. Riattang Barat	1.500	Km
8	Ruas Jalan Pendidikan Desa Watu Kec. Barebbo	1.500	Km
9	Ruas Jalan Depan SMP 6 / SMK 3 Kec. T. Riattang	0.200	Km
	TOTAL	10.30	Km

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR

Pembangunan Jalan 02 (DAU Pokok)

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.766.113.000 dengan realisasi anggaran Rp. 5.769.270.200 tahun 2017 dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 6.842.800.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan, pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud.

Tabel 2.5.1.2. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU)

Tahun Anggaran 2017

NO	Nama Ruas (Lokasi)	Volume	Satuan
1	Ruas Jalan Kompleks Terminal Petta Pongawae Kec. T. Riattang Barat	0.300	Km
2	Ruas Jalan Dsn Lerang Desa Abbumpungeng Kec. Cina	0.700	Km
3	Ruas Jalan Jalan Calo - Buareng Kec. Sibulue	1.500	Km
4	Ruas Jalan IKK Tonra (Desa Bulu-bulu Kec. Tonra)	1.000	Km
5	Ruas Jalan IKK Mare (Kadai-Padaelo)	1.000	Km
6	Ruas Jalan IKK Ulaweng (Jalan Pahlawan)	1.000	Km
7	Ruas Jalan IKK Ponre	0.770	Km
	TOTAL	6.27	Km

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR

Pembangunan Jalan 03 (DAU Perubahan)

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 40.581.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 39.448.542.00 atau 97.21% dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 1.133.408.000

Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan, pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud.

Tabel 2.5.1.3. Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU Perubahan)

NO	Nama Ruas (Lokasi)	Volume	Satuan
1	- Ruas Jalan Pabbacue - Lonrong	0.276	Km
2	- Ruas Jalan Kampung Baru - pelabuhan Barebbo	1.000	Km
3	- Ruas Jalan Uloe – Timurung	2.000	Km
4	- Ruas Jalan Balange - Masago	1.400	Km
5	- Ruas Jalan Palakka – Hulo	1.000	Km
6	- Ruas Jalan Padaelo-Lappabosse-Kalero	1.000	Km
7	- Ruas Jalan Kol.A. Suaib	0.430	Km
8	- Ruas Jalan A.P. Pettarani	0.500	Km
9	- Ruas Jalan A.Sulolipu Dalam	0.150	Km
10	- Ruas Jalan K.H. Ramli	0.289	Km
11	- Ruas Jalan Latenri tappu & Laummasa	0.690	Km
12	- Ruas Jalan Sungai Musi	1.000	Km
13	- Ruas Jalan Sungai Limboto	1.000	Km
14	- Ruas Jalan Sungai Asahan	0.693	Km
15	- Ruas Jalan Sungai Barito	0.172	Km
16	- Ruas Jalan Passippo – Mico	1.000	Km
17	- Ruas Jalan Mutiara-Waeputtang(BontoRihu)	1.087	Km
18	- Ruas Jalan Jampue-Palakka	1.000	Km
19	- Ruas Jalan Waekecce'e-Pekkae-Larumange	2.000	Km
20	- Ruas Jalan Masago - Patimpeng	0.940	Km
21	- Ruas Jalan Malaka – Balubu	1.650	Km
22	- Ruas Jalan Lilina Ajangale - Alinge	1.500	Km
	TOTAL	20.777	Km

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR

2.5.2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat perencanaan teknis jembatan berbentuk dokumen sebagai acuan teknis pelaksanaan fisik pembangunan jembatan yang dimaksud. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 993.105.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 966.679.500 atau 97,34% sisa anggaran Rp. 26.426.000.

Kegiatan ini meliputi 6 Paket Dokumen Perencanaan, Biaya administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

2.5.3. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jembatan Sungai Waru Kecamatan Mare. Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.039.874.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.831.069.946 realisasi anggaran 92,10% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini meliputi pekerjaan fisik jembatan, biaya pengawasan, biaya administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel 2.5.3. Realisasi Pembangunan Jembatan T.A. 2017

No.	NAMA PEKERJAAN	PANJANG (m)
1.	Pembangunan Jembatan Sungai Cege Kec. Mare	100.00
2.	Pembangunan Jembatan Sungai Sumaling Kec. Mare	6.00
3.	Pembangunan Jembatan Sungai Bunne Kec. Libureng	12.00
4.	Pembangunan Jembatan Sungai Laburasseng Kec. Libureng	10.00
5.	Pembangunan Jembatan Ulu Bubung Desa Lompu Kec. Cina	6.00
6.	Pembangunan Jembatan Gantung Opo Kec. Ajangale	45.00
7.	Pembangunan Jembatan Gantung Pongka Kec. Tellu Siattinge	30.00
8.	Pembangunan Jembatan Gantung Kel. Pompanua Riattang Sumpang Opo Kec. Ajangale	45.00

9.	Pembangunan Jembatan Sungai Pattiro Sompe Kec. Sibulue	4.70
	TOTAL	258,7

2.5.4. Kegiatan Bulan Bakti TNI

Kegiatan ini sebagai wujud kerja sama dengan TNI dalam membantu menyiapkan pelaksanaan Infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan. Kegiatan bulan bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 760.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 720.213.000 atau 94,76% dengan sisa anggaran Rp. 39.787.000. Realisasi anggaran meliputi Biaya Perencanaan, biaya fisik dengan realisasi 1,90 Km, biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

2.6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program dengan anggaran sebesar Rp. 211.767.500 dengan realisasi Rp. 207.239.086 atau 97,86%. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu :

2.6.1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Kegiatan ini mencakup penyusunan Renja, LPPD, perjalanan dinas, ATK dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini. Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.487.500 dengan realisasi Rp.122.692.400 atau 99,36% dengan sisa anggaran sebesar Rp.795.100.

Data Capaian yang dilaporkan pada LKjIP adalah berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel. 2.7.1.1. Rencana Capaian Kinerja Tahun 2013 – 2018

2

FOKUS /BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Persentase Penanganan Jaringan Jalan di Kabupaten Bone	%	40.00	46.67	53.33	60.00	66.67	73.33	80.00
Total penanganan jalan	KM	623.80	727.77	831.74	935.71	1,039.68	1,143.66	1,247.63
Persentase Rencana	KM		103.97	103.97	103.97	103.97	103.97	103.97
Persentase Penanganan Jembatan di Kabupaten Bone	%	40.00	46.67	53.33	60.00	66.67	73.33	80.00
Total Penanganan Jembatan	M	1,859.48	2,169.39	2,479.31	2,789.24	3,099.17	3,409.10	3,719.03
Persentase Rencana	M		309.91	309.91	309.93	309.93	309.93	309.93
Persentase Peningkatan infrastruktur perdesaan	%	20.00	25.00	32.16	38.68	45.57	51.50	60.00
Total penanganan jalan desa	KM	184.43	230.54	296.64	356.75	420.30	474.96	553.28
Persentase Rencana	KM		46.11	66.11	60.11	63.55	54.66	78.32

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan

Tabel 2.7.1.2. Realisasi Capaian Kinerja 2013 - 2017

FOKUS /BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT.	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Realisasi penanganan jalan pertahun	Km	623.80	136.76	194.87	174.06	120.10	70.588	-
Total Realisasi penanganan jalan	Km	623.80	760.56	955.43	1129,49	1249,59	1368,01	
Persentase Capaian	%	40.00	48.77	61.26	72.43	80.13	84.65	
Realisasi penanganan jembatan pertahun	M	1,859.48	285	417.5	540.30	154.40	466	

Total Realisasi penanganan jembatan	M	1,859.48	2144.48	2561.98	3102.28	3256.68	3722.68	
Persentase Capaian	%	40.0	46.13	55.11	66.73	70.06	80.08	
Realisasi Peningkatan infrastruktur perdesaan pertahun	Km	184.43	44.31	21.75	61.59	54.36	62.44	
Total Realisasi Peningkatan infrastruktur perdesaan	Km	184.43	228.74	250.49	312.08	366.44	428.88	
Persentase Capaian	%	20.00	24.81	27.16	33.84	39.74	46.51	

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan

2.6.2. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Kegiatan ini dalam rangka pemutahiran data kemiskinan disalah satu kecamatan di Kabupaten Bone. Dengan Anggaran sebesar Rp. 88.280.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.546.686 atau 95.77% dengan sisa anggaran Rp. 3.733.314.

Kegiatan ini membiayai pekerjaan assesmen kemiskinan yang ada di Kecamatan Tellu Limpo, melakukan pemutahiran data kemiskinan *by name by address*. Honorarium, ATK, Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

2.7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 57.000.000 atau 80,28% tersisa anggaran sebesar Rp. 14.000.000

Kegiatan ini meliputi :

1. Pembuatan Pintu Gerbang 2 Paket

2. Biaya Lomba Desa
3. Biaya Dokumentasi dan Bahan pajangan
4. Biaya Dekorasi stand pameran dan panggung
5. Biaya sewa stand pameran pembangunan

2.8. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini dengan anggaran sebesar Rp. 79.422.960.426 dengan realisasi sebesar Rp.79.274.466.176 atau 99.81% sisa anggaran Rp. 148.494.250.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

2.8.1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini mendukung terwujudnya dokumen teknis perencanaan jalan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.261.035.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.252.694.500 atau 99.34% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.340.500.

Kegiatan telah melaksanakan perencanaan teknis jalan dengan melahirkan 15 Dokumen teknis DED dan RAB perencanaan jalan terdiri dari ruas-ruas jalan sebagaimana terlampir pada lampiran 2.11.

2.8.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

Kegiatan ini telah melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal mewujudkan infrastruktur jalan. Rencana anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.765.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 38.763.500.000 atau 99.99% dengan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini telah melakukan pekerjaan fisik jalan sepanjang **32.226 Km** sebagaimana daftar dibawah ini.

Tabel 2.11.2 Daftar Ruas Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

No	NAMA RUAS	VOLUME	SAT.
1	Ruas Jalan Palattae - Pammusureng Kec. Kahu/Bontocani	2.611	Km
2	Ruas Jalan Cenrana - Labotto (Bts. Wajo) Kec. Cenrana	4.447	Km
3	Ruas Jalan Paccing - Mattirowalie Kec. Awangpone	4.27	Km
4	Ruas Jalan Teko - Kaju Kec. Cina	2.413	Km
5	Ruas Jalan Waetuo - Lamurukung Kec. Awangpone/Tellu Siattinge	5.885	Km
6	Ruas Jalan Salosawae - Tujue Kec. Tellu Limpoe	1.1	Km
7	Ruas Jalan Poleonro - Barakkae Kec. Lamuru	1.5	Km
8	Ruas Jalan Patangkai - Waekecece Kec. Lapri	1.5	Km
9	Ruas Jalan Mattaropurrae - Tobenteng Kec. Amali	1.4	Km
10	Ruas Jalan Ureng - Lonrong Kec. Palakka	1	Km
11	Ruas Jalan Masago - Patimpeng Kec. Patimpeng	1.6	Km
12	Ruas Jalan Padaidi - Pallawarukka Kec. Tellu Siattinge	1.5	Km
13	Ruas Jalan Watu - Pallae Kec. Cenrana	1.5	Km
14	Ruas Jalan Wanuwawaru - Pitumpidange Kec. Libureng	1.5	Km
	TOTAL	32.226	KM

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR

Selain itu dalam kegiatan tersebut diatas, kegiatan ini telah membiayai ATK, Honorarium, Makan dan minum, perjalanan dinas terkait pelaksanaan kegiatan ini.

2.8.3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Rutin)

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan jalan rutin dalam bentuk swakelola. Bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan tetap baik atau dari rusak ringan dan berat menjadi baik. Sehingga kondisi mantap jalan semakin baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Kegiatan ini rencana anggarannya sebesar Rp. 1.832.315.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.700.974.250 atau 92.83% tersisa anggaran sebesar Rp. 131.340.760.

Kegiatan ini telah melaksanakan pekerjaan jalan sebagaimana terlampir pada lampiran 2.11.3. Kegiatan ini juga telah membiayai perjalanan

dinas, ATK, honorarium terkait pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan (Rutin).

2.8.4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DID)

Kegiatan ini juga telah mewujudkan ifrastruktur jalan di 6 lokasi Kecamatan. Kegiatan ini telah mendukung tugas dan fungsi Dinas PU-PTR dalam mencapai target kinerja jalan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 20.790.129.000 dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 20.794.498.500 atau 99,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 630.500.

Kegiatan ini telah merealisasikan Pengaspalan Jalan dengan total panjang 8,1 Km, selain itu membiayai honorarium, ATK, Perjalanan Dinas, Makan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel 2.11.4. Daftar Realisasi Ruas Rehab/Pemeliharaan Jalan (DID)

NO	Nama Ruas Jalan	Volume Satuan
1	Ruas Jalan Salosawae – Barakkae Kec. T. Limpoe	1.1 Km
2	Ruas Jalan Polenro – Barakkae Kec. Lamuru	1.5 Km
3	Ruas Jalan Masago – Patimpeng Kec. Patimpeng	1.5 Km
4	Ruas Jalan Patangkai – Waekecce Kec. Lapri	1.4 Km
5	Ruas Jalan Wanuwawaru – Pitumpidange Kec. Libureng	1.0 Km
6	Ruas Jalan Mattaropuræ – Tobenteng Kec. Amali	1.6 Km
	T O T A L	8.1 Km

Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU -

2.9. Program Kondisi Jalan dan Jembatan

Program ini dengan 2 kegiatan yaitu inspeksi jalan dan inspeksi jembatan pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp. 153.470.000 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 153.390.000 atau 99,95% dengan Sisa Anggaran Rp. 80.000. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

2.9.1. Kegiatan Inspeksi Jalan

Kegiatan ini mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam pemutahiran kondisi jalan setiap tahun. Alokasi anggaran Rp. 10.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.920.000 atau 99,92% dengan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini membiayai survey pengukuran yang dilakukan oleh pihak ke 3 dengan tenaga ahlinya, perjalanan dinas, honorarium, ATK dalam pelaksanaan inspeksi jalan.

Tahun 2017 telah disurvey kondisi jalan sebanyak 356 Ruas dengan total panjang jalan 2483,30 Km. Gambaran tentang kondisi jalan Tahun 2013 - 2017 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.1. Kondisi Jalan Tahun 2013 - 2017

TAHUN	BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP
TAHUN 2013	36,67	14,64	17,95	30,75	51,31
TAHUN 2014	40,87	17,51	23,90	17,72	58,38
TAHUN 2015	41,04	16,42	22,55	19,99	57,46
TAHUN 2016	43,21	18,47	23,34	14,98	61,68
TAHUN 2017	45.24	26.01	15.24	13.51	71.25

Sumber : Data Kondisi Jalan & Jembatan 2017

2.9.2. Kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan

Kegiatan ini bertujuan melakukan inspeksi atau survey pada kondisi jembatan setiap tahun. Survey kondisi jembatan menggunakan

anggaran sebesar Rp. 50.470.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.470.000 atau 100% realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini membiayai Survey kondisi jembatan yang dilakukan oleh tenaga ahli konsultan, honorarium pelaksana, ATK, Administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi jembatan dari tahun ke tahun yang ada di Kabupaten Bone.

Tabel. 3.9.2. Kondisi Jembatan tahun 2013 - 2017

TAHUN	BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP
TAHUN 2013	74,97	3,45	9,40	12,18	78,42
TAHUN 2014	76,10	3,50	9,46	10,90	79,60
TAHUN 2015	79,13	10,96	5,58	4,33	90,09
TAHUN 2016	77,97	8,21	4,20	9,62	86,18
TAHUN 2017	78.25	9.97	3.15	8.63	88.22

Sumber : Data Kondisi Jalan & Jembatan

2.10. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Program ini memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.410.000 realisasi Rp. 4.410.000 atau 100%. Kegiatan ini melakukan survey pada titik rawan bencana pada tahun 2017. Kegiatan ini meliputi pembiayaan Honorarium, ATK, Perjalanan Dinas.

2.11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini dengan satu kegiatan alokasi anggarannya sebesar Rp. 267.545.000 realisasinya Rp. 236.580.420 atau 88.43%. Kegiatan ini

membayai upah kerja operator alat berat, Penggantian suku cadang, bahan bakar, ATK, Biaya STNK, sevice, perjalanan dinas dan administrasi.

Jenis alat berat dan kendaraan yang didanai oleh kegiatan ini adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Daftar Alat dan Kendaraan Berat Dinas PU – PTR

NO	Jeni Alat & Kendaraan Berat	Vol.Sat	Kondisi
1	EXCAVATOR	1 UNIT	Baik
2	WHEL LOADER	2 UNIT	Rusak Ringan
3	MOTOR GRADER	3 UNIT	Rusak Ringan
4	BECHO LOADER	1 UNIT	Baik
5	WALES TANDEM	1 UNIT	Baik
6	WALES DORONG	1 UNIT	Baik
7	WALES DUAS RODA	1 UNIT	Baik
8	WALES TIG A RODA	1 UNIT	Baik
9	TRUCK	3 UNIT	Baik

Sumber : Data Kondisi Bidang

2.12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Program ini dengan dua kegiatan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.562.295.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.163.280.350 atau 98,38%. Kegiatan pada program ini yaitu :

2.12.1. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Kegiatan ini mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal penyiapan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah permukiman di perdesaan. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 173.602.500 realisasi Rp. 115.412.500 atau 66.48% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 58.190.000.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan pada ATK, Perjalanan Dinas, Administtrasi, Honorarioium dalam pelaksanaan kegiatan.

2.12.2. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kegiatan ini adalah menyediakan fisik infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan. Tahun 2017 penganggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.609.560.000 realisasi anggaran Rp. 23.409.0284.950 atau 99,15% progress fisik 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 200.275.050.

Kegiatan ini merealisasikan 52 Paket Jalan dan 4 paket Jembatan sebagaimana daftar tabel terlampir pada lampiran 2.15.2. Selain membiayai fisik baik perencanaan dan pengawasan kegiatan ini juga membiayai perjalanan dinas, ATK, Makan dan Minum, Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

2.13. Program Pengaturan Jasa Kontruksi

Program ini memiliki satu kegiatan yaitu **Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan** dengan anggaran Rp. 250.382.000 realisasi anggaran Rp. 209.553.100 atau 83,69% sisa anggaran Rp. 40.828.900. Kegiatan ini mendukung peningkatan sumber daya bagi pegawai PNS ataupun Non PNS pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Kursus singkat/Pelatihan Aplikasi GIS**

Tujuan kegiatan ini adalah melatih tenaga operator GIS untuk pemanfaatan bidang jalan/jembatan dan GIS Pemanfaatan ruang. Diikuti oleh peserta dari masing-masing bidang dilingkup PU-PTR

2. Bimbingan Teknis tentang jalan/jembatan dan penataan ruang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Terhadap pekerjaan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Peserta pelatihan ini adalah PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Tim PPHP, Pejabat Pengadaan.

3. Bimbingan teknis dan sinkronisasi Infrstruktur wilayah Kabupaten Bone.

Kegiatan ini melakukan pemutahiran data infrastruktur yang terbangun di desa masing-masing yang selanjutnya data tersebut menjadi data base infrastruktur jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang. Peserta pada kegiatan ini adalah Seluruh Camat dan Seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bone.

2.14. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) alokasi anggaran Rp. 400.000.000 realisasi Rp. 396.991.000 atau 99,25%. Realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini mendukung terwujudnya dokumen teknis perencanaan jalan yang efektif terhadap rencana pelaksanaan fisik di Tahun 2018. Pada kegiatan ini melahirkan 8 dokumen teknis RAB dan DED untuk pekerjaan jalan yang direncanakan fisiknya di Tahun 2018. Pembiayaan anggaran hanya untuk membiayai pelaksanaan perencanaan berupa konsultan perencana teknis jalan 8 paket.

Untuk mencapai indikator kinerja urusan tersebut maka pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten telah tersusun Rencana Strategis (**RENSTRA**) 2013 – 2018 dan Review Renstra Tahun 2013 – 2018. Rencana

Strategis yang disusun diharapkan mampu mewujudkan pencapaian RPJMD yang dimaksud pada misi ke-4 melalui Bidang yang ada pada struktur organisasi dan perubahannya. Tabel dibawah ini merupakan rekapitulasi program dan rencana anggaran yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 Urusan Penataan Ruang :

<i>NO</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>RENCANA ANGGARAN (Rp.)</i>	<i>REALISASI ANGGARAN (Rp)</i>	<i>CAPAIAN %</i>
1	Program Perencanaan Tata Ruang	916,410,000	810,059,401	88.39
2	Program Pemanfaatan Ruang	29,600,000	24,690,000	83.41
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	51,000,000	44,070,000	86.41
TOTAL		997,010,000	878,819,401	88.15

Sumber Data Monev Tahun 2017 Dinas PU - PTR

1.1. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini terdiri dari dua kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 916.410.000 dengan realisasi anggaran Rp. 810.059.401 atau 88,39% tersisa

1.1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kegiatan ini mendukung tugas fungsi pokok dalam sasaran penataan ruang dalam hal terdianya dokumen tentang RDTR Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Rencana anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 491.432.500 terealisasi Rp. 480.204.800 atau 97,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.227.700.

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan “Mallusetasi” 1 dokumen. Termasuk membiayai administrasi dan honorarium dalam rangka melaksanakan kegiatan ini.

1.1.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

Kegiatan ini mendorong terciptanya perda tentang kawasan dari Dokumen RDTR yang sudah ada. Rencana anggaran sebesar Rp. 229.375.000 dengan realisasi anggaran Rp. 154.839.801 atau 67,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.535.199.

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi rancangan Perda RDTR, Sosialisasi Rancangan Perda Bangunan Gedung, membiayai administrasi dan honorarium terkait pelaksanaan kegiatan ini.

1.1.3. Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang.

Kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal meujudkan dokumen RTRW yang efektif. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 195.602.500 realisasi sebesar Rp. 175.014.800 atau 89,47% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 20.587.700.

Kegiatan ini membiayai honorarium Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Ahli. Termasuk ATK dan Administrasi serta Honorarium dalam pelaksanaan kegiatan ini.

1.2. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi terkait penataan ruang dengan member rekomendasi kelayakan izin terhadap jenis bangunan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.600.000 dengan realisasi Rp. 24.690.000 atau 83,43% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.910.000.

Kegiatan ini meliputi perjalanan dinas, honorarium, ATK terkait pelaksanaan program dan kegiatan ini. Pada kegiatan ini telah mengeluarkan 159 rekomendasi dari berbagai jenis pengajuan izin kelayakan. 102 diantaranya diberi rekomendasi layak dan memenuhi syarat, sementara 57 rekomendasi ditolak karena ketidaksesuaian perizinan dalam hal ini melanggar aturan. Selain itu ada 1 rekomendasi ditolak karena tidak sesuai dengan fungsi lahan. Rinciannya sebagaimana terlampir pada lampiran 2.9.

1.3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.000.000 terealisasi sebesar Rp. 44.070.000 atau 86.41% tersisa anggaran Rp. 6.930.000. Kegiatan ini meliputi Belanja bahan pameran, Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan ATK dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.1. REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi Penggunaan Gedung "Sao Deceng" di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 4.500.000
2. Penyewaan Alat Berat	Rp. 129.900.000
Total Jumlah	Rp. 134.400.000

3.1.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 199.414.862.102** atau 97,87%

Tabel 3.17. Rencana dan Realisasi Anggaran 2017

NO	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 9,803,083,600.00	Rp 9,181,445,716.00	93.66
2	Belanja Langsung	Rp 193,959,228,789.00	Rp 190,233,416,386.00	98.08
J U M L A H		Rp 203,762,312,389.00	Rp 199,414,862,102.00	97.87

3.1.3. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran belanja tidak langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.181.445.716 atau 93.66% yang di arahkan untuk :

- Gaji Tunjangan **Rp. 4.590.722.858**
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi **Rp. 3.662.912.620**
- Tunjangan Keluarga **Rp. 335.193.142**
- Tunjangan Jabatan **Rp. 188.625.000**
- Tunjangan Umum **Rp. 165.455.000**
- Tunjangan Beras **Rp. 236.885.820**

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus **Rp. 1.594.224**
- Pembulatan Gaji **Rp. 57.052**

2. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 Rp. 190.233.416.386 (98.08%)

3.1.4. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

Beberapa hal yang menyebabkan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

- Tingkat kerusakan pada jaringan jalan/jembatan cukup tinggi.
- Belum mutakhirnya data base jalan/jemb atan
- Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
- Terbatasnya alokasi pendanaan pemerintah Kabupaten Bone dalam membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan.
- Terbatasnya peralatan alat berat secara kuantitas dan kualitas.
- Permintaan pemakaian alat berat tidak sebanding dengan ketersediaan alat berat.
- Masih banyak wilayah Kabupaten belum memiliki rencana detail tata ruang.

2. Solusi Permasalahan

- Melaksanakan tufoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif yaitu mengutamakan prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Selain itu mengupayakan bantuan Pemerintah pusat melalui program-program kementerian PU-PR yang ada.
- Mengalokasikan perencanaan anggaran lebih efektif pada program pemeliharaan jalan dan jembatan (rutin) yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan

- Melakukan pengadaan alat berat dengan mempertimbangkan jenis alat berat yang disesuaikan kebutuhan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Melakukan perencanaan detail tata ruang sesuai kebutuhan yang mendesak khususnya kawasan utama dan penyangga.

B. Aspek Keuangan

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan Belanja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Gaji dan Tunjangan. Adapun realisasi belanja tidak langsung Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah Belanja Pegawai , honor, insentif merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. Adapun realisasi belanja langsung Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 03 tahun 2008 (Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Bone Tahun 2008 nomor 03)

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh ke depan tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan Inovatif. Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah :

“Tersedianya Infrastruktur jalan dan jembatan serta Penataan Ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Frase visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai berikut ;

- a. **Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas** memiliki arti terciptanya infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki aksesibilitas, mobilitas, aman, nyaman, dan lancar dalam mendukung tercapainya masyarakat Kabupaten Bone yang sejahtera.
- b. **Infrastruktur Penataan Ruang yang berkualitas** memiliki arti terciptanya infrastruktur Penataan Ruang dalam menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

2. Misi

Misi merupakan suatu yang dirumuskan untuk menggerakkan organisasi. Misi menggambarkan yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab.

Misi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Bone yaitu :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada wilayah-wilayah terpencil.
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pada daerah perkotaan dan perdesaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.
5. Meningkatkan infrastruktur Penataan Ruang secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dibidang irigasi.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya air.

C. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Bone

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah merupakan cara untuk mencapai misi yang telah dirumuskan. Berikut adalah tujuan dan sasaran dari masing- masing misi, yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang :

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, memiliki tujuan, Menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas, mobilitas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Sasarannya yaitu :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Teridentifikasinya kondisi jalan dan jembatan.
2. Misi-2 : Meningkatkan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil, memiliki tujuan, yaitu:
 - a. Memberikan kemudahan mobilitas masyarakat terpencil Sasarannya yaitu:
 1. Meningkatnya akses infrastuktur yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
3. Misi-3 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, memiliki tujuan
 - a. Menyediakan sarana prasarana jalan dan jembatan yang mampu menunjang arus transportasi orang dan barang. Sasarannya yaitu :
 1. Meningkatnya efisiensi jaringan jalan dan jembatan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian.

4. Misi-4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan, memiliki tujuan :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam menunjang pembangunan infrastruktur, Sasarannya yaitu :
 1. Meningkatnya kelancaran pembangunan infrastruktur.
5. Misi-5 : Meningkatkan infrastruktur PTR secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dibidang irigasi, memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pada daerah irigasi, Sasarannya yaitu :
 1. Terpenuhinya kebutuhan dan ketersediaan air pada daerah irigasi.
6. Misi-6 : Meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai yang berkelanjutan, memiliki tujuan :
 - a. Terpeliharanya kondisi DAS secara berkelanjutan, Sasarannya yaitu :
 1. Terpeliharanya kualitas DAS.
7. Misi-7 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya air. , memiliki tujuan :
 - a. Terpeliharanya kualitas PTR, Sasarannya yaitu :
 1. Terpeliharanya kualitas PTR berkelanjutan.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

- Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di arahkan pada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Penataan Ruang dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Ongkos Kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeulair
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Pembangunan jalan
 - Pembangunan jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Bulan Bakti TNI
- 6. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
 - Penyusunan dan Analisis data informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Penyelenggaraan pameran Investasi (Pameran & Lomba Desa)
- 8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK + DAU)
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Rutin)
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Dau)
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
- 9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - Inspeksi Kondisi jalan
 - Inspeksi Kondisi Jembatan

10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
 - Penyusunan Sistem Informasi/Data Base jalan
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Pembangunan Peningkatan Infrastruktur
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
 - Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
 - Program Pengaturan Jasa Konstruksi
 - Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
 - Revisi RTRW
13. Program Pemanfaatan Ruang
 - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

BAB V

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasarannya maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan sumber dana yang dibutuhkan

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja, disiplin dan mantapnya budaya aparatur yang profesional, serta terlaksananya pemanfaatan aparatur untuk menangani program dan kegiatan dinas.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja mendukung tupoksinya dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terlaksananya pembenahan sistem, prosedur, dan standarisasi kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
5. Terpeliharanya sarana dan prasaarana operasional Dinas dan UPTD dan terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Tersusunnya Rencana Strategis, Lakip, LKPJ, dan LPPD Dinas, serta tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja organisasi dinas.
7. Terwujudnya dokumen operasional organisasi dinas yang dalam hal ini RKA, DPA, DPPA, DIPA Dekonsentrasi dan DIPA Tugas Pembantuan, serta meningkatnya pengelolaan asset milik pemerintah Kabupaten Bone.
8. Tersedianya dokumen studi dan perencanaan jalan dan jembatan
9. Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan fungsi IUJK
10. Tersedianya infrastruktur PTR yang dapat mengendalikan banjir, kekeringan dan abrasi pantai.
11. Terbangunnya sistem data dan informasi.
12. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi..

13. Terpeliharanya kondisi dan optimalnya pemanfaatan alat berat yang ada
14. Tersedianya Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam tata bangunan serta pengendalian ruang di wilayah Kabuapten Bone.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat umum dengan profesi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/pertambakan.
2. Masyarakat pesisir pantai dan nelayan.
3. Masyarakat pegunungan dan perbatasan wilayah kabupaten.
4. Wilayah industri kemasyarakatan.

C. Sumber Pendanaan

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain berasal dari APBD baik DAK maupun DAU, Diperlukan juga dorongan untuk meningkatkan etos kerja melalui kemitraan pemerintah daerah dan pusat lewat program yang bersumber dari dana APBN.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2018 serta usulan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan digambarkan pada lampiran Tabel Rencana Kerja Dinas PU & PTR Tahun 2018

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023, Visi dan Misi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Watampone, 14 Mei 2018


H. H. KHALIL, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196551112 199203 1 014

LAMPIRAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018

Tabel Rencana Kerja 2019

Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Tahun 2019

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

Tabel Realisasi Belanja Langsung Dinas PU&PTR Tahun 2017

Tabel Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas PU&PTR Tahun 2017

Tabel Data Capaian Kinerja 2013 - 2017

Tabel Rekapitulasi DPA Tahun 2018

Gambar Peta Ruas Jalan Kabupaten